KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Masa sidang V; parlemen fokus bahas APBN & RUU
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Masa Sidang V

Parlemen Fokus Bahas APBN & RUU

KETUA DPR Puan Maharani memastikan agenda pelaksanaan Masa Sidang V kali ini, DPR akan lebih fokus membahas kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024. Pihaknya juga akan fokus menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda.

APBN Tahun 2024 merupakan APBN terakhir dari periode Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Karena itu, prioritas APBN tahun 2024 akan diarahkan pada penuntasan program prioritas dan strategis yang akan memperkuat landasan dalam memajukan Indonesia," jelas Puan dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Sidang V DPR Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Puan mendorong seluruh kelengkapan DPR untuk lebih fokus terarah dalam pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, serta kebijakan belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024.

Dengan demikian, kebijakan APBN tahun depan nanti dapat menuntaskan program prioritas, memperkuat dan mempertajam kebijakan-kebijakan yang sebesar-besarnya dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Jadi, program-program yang betul-betul berpijak kepada rakyat kecil, dapat mempercepat kesejahteraan bersama, dan mempercepat kemajuan dan perekonomian Indonesia yang kuat," tegasnya.

Selain itu, putri sulung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini juga menegaskan, masa sidang kali ini juga akan fokus dalam memantau kesiapan dan pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024.

Dengan sudah mulai berjalannya tahapan pemilu ini, tentunya DPR akan melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, sehingga pemilu yang berlangsung demokratis, berkeadaban, maju, jujur dan adil.

Lebih lanjut Puan menuturkan, dalam masa sidang ini, DPR juga akan fokus menuntaskan sejumlah RUU yang tertunda.

"DPR bersama Pemerintah dan DPD akan memprioritaskan menyelesaikan 9 RUU yang saat ini masih dalam pembicaraan tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023," ujarnya.

Pembentukan undang-undang oleh DPR dan Pemerintah, kata Puan, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional dalam rangka menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjalankan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan fungsi ini, tentu akan ada perdebatan karena adanya perbedaan perspektif dan sudut pandang. Namun, seluruh dinamika tersebut, dibatasi oleh norma-norma yang terdapat dalam UUD 1945.

"Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam pembentukan undang-undang maupun dalam pembahasan telah diatur dalam mekanisme peraturan perundang-undangan," ujarnya. ■ KAL